

# **BAB 1**

## **PENDAHULUAN**

### **1.1 Latar Belakang**

Dalam era reformasi seperti sekarang, di setiap negara pasti menginginkan tata kelola pemerintahan yang baik atau yang biasa dikenal dengan *good government governance*. Indonesia perlahan-lahan sudah berkembang menuju era keterbukaan dan transparansi. Dalam Era transparansi dan keterbukaan ini, Indonesia diharapkan akan lebih terbuka baik dalam sistem kegiatan yang dilaksanakan maupun dalam mengalokasikan anggaran. Kualitas laporan keuangan pemerintah daerah merupakan tuntutan publik dalam pelaksanaan pemerintahan yang baik dan memerlukan sebuah prinsip-prinsip manajemen keuangan daerah, baik pada tahap penganggaran, implementasi maupun pada saat pertanggungjawaban. Sehingga harus dilakukan oleh aparatur yang memiliki kompetensi di bidang pengelolaan keuangan daerah serta harus memahami sistem akuntansi khususnya akuntansi keuangan daerah, agar informasi yang disajikan dalam laporan keuangan dapat dipahami oleh pengguna (Yusniyar, dkk 2016: 1).

Tidak terlepas dari itu, bahwa akan terdapat banyak pihak atau *stakeholders* yang akan mengandalkan informasi laporan keuangan yang disusun oleh pemerintah daerah sebagai dasar dalam pengambilan keputusan baik keputusan ekonomi, sosial, dan budaya. Oleh karena itu, informasi dalam laporan keuangan harus berkualitas. Informasi dalam laporan keuangan yang akan dipublikasikan tersebut harus disajikan secara wajar terbebas dari salah saji yang material maupun tidak material sehingga tidak menyesatkan para penggunanya. Laporan keuangan akan bermanfaat jika laporan keuangan yang diinformasikan disajikan secara valid, andal, dan dapat dipahami.

Salah satu cara yang diterapkan pemerintah dalam upaya perbaikan dalam meningkatkan transparansi akuntabilitas pengelolaan keuangan daerah yaitu dengan dilakukannya reformasi manajemen keuangan dengan ditetapkannya Undang-undang Nomor 32 tahun 2004 tentang Otonomi Daerah sebagai pengganti dari Undang-undang nomor 22 tahun 1999, dan Undang-undang Nomor 33 tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pusat dan Daerah.

Dalam kaitannya dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku, maka saat ini dikeluarkan Peraturan Pemerintah Nomor 71 tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan (SAP) sebagai pengganti dari Peraturan Pemerintah Nomor 24 tahun 2005 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan yang menggunakan basis kas menuju akrual. Standar akuntansi pemerintah (SAP) merupakan standar akuntansi yang diterapkan dalam menyusun dan menyajikan laporan keuangan pemerintah.

Laporan keuangan merupakan sebuah produk yang dihasilkan oleh bidang atau disiplin ilmu akuntansi. Laporan keuangan pemerintah dalam pelaksanaannya disampaikan kepada DPR/DPRD dan masyarakat umum setelah di audit oleh Badan Pemeriksa Keuangan (BPK). Di dalam laporan keuangan berdasarkan PP Nomor 71 tahun 2010 terdapat komponen-komponen laporan keuangan meliputi Laporan Realisasi Anggaran (LRA), Laporan perubahan Saldo Anggaran Lebih (LPSAL), Neraca, Laporan Arus kas (LAK), Laporan Operasional (LO), Laporan Perubahan Ekuitas (LPE), dan Catatan atas Laporan Keuangan (CaLK).

Bentuk laporan pertanggungjawaban atas pengelolaan keuangan daerah selama satu tahun anggaran adalah Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD). Laporan keuangan terutama digunakan untuk membandingkan realisasi pendapatan, belanja, transfer dan pembiayaan dengan anggaran yang telah ditetapkan, menilai kondisi keuangan, mengevaluasi efektivitas dan efisiensi suatu entitas pelaporan dan membantu menentukan ketaatannya terhadap peraturan perundang-undangan (Sihombing, 2011: 4). Pemeriksaan atas laporan keuangan dilakukan dalam rangka memberikan pendapat/opini atas kewajaran informasi keuangan yang disajikan dalam laporan keuangan (Ratifah, 2012: 30). Menurut Peraturan Pemerintah nomor 71 tahun 2010 Informasi dalam laporan keuangan pemerintah dikatakan berkualitas jika informasi tersebut memenuhi kriteria dalam akuntansi pemerintahan yaitu relevan (*relevance*), andal (*reability*), dapat dipahami (*understandability*) dan dapat di bandingkan (*comparability*). Kualitas laporan keuangan pemerintah daerah dapat tercermin dari hasil pemeriksaan BPK (Ratifah, 2012: 30). Terdapat empat opini yang diberikan pemeriksa yaitu: Opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP), Opini Wajar Dengan Pengecualian (WDP),

Opini Tidak Wajar (TW), dan Pernyataan Menolak memberi Opini atau Tidak Memberi Pendapat (TMP) (Liza rahayu dkk, 2014).

Selain itu agar penerapan akuntansi pada laporan keuangan daerah dapat dikatakan berkualitas adalah dengan diterapkannya sistem akuntansi. Sistem akuntansi adalah formulir-formulir, catatan-catatan, prosedur prosedur, dan alat-alat yang digunakan untuk mengelolah data mengenai usulan suatu kesatuan ekonomis dengan tujuan untuk nmenghasilkan umpan, baik dalam bentuk laporan-laporan yang dilakukan oleh manajemen untuk mengawasi usahanya dan bagi pihak-pihak lain yang berkepentingan seperti pemegang saham kreditur dan lembaga-lembaga pemerintah untuk memulai hasil operasi (Baridwan, 2008: 4). Jika belum memahami sistem akuntansi, maka belum memahami penyusunan laporan keuangan, karena akuntansi pada dasarnya merupakan sistem pengolahan informasi yang menghasilkan keluaran berupa informasi akuntansi atau laporan keuangan (Baridwan, 2007: 4).

Sebagaimana pengertian sistem akuntansi keuangan daerah itu sendiri adalah sistem akuntansi yang meliputi proses pencatatan, penggolongan, penafsiran, peringkasan transaksi atau kejadian keuangan serta pelaporan keuangan dalam rangka pelaksanaan anggaran pendapatan belanja daerah (APBD) (Erlina dan Rasdianto, 2013: 6). Menurut Peraturan Pemerintah Nomor 71 tahun 2010 Penyusunan laporan keuangan daerah yang berpedoman pada Sistem Akuntansi Keuangan Daerah dimaksudkan dalam rangka peningkatan kualitas laporan keuangan, sehingga diharapkan laporan keuangan yang dimaksud mampu meningkatkan kredibilitasnya dan pada gilirannya akan dapat mewujudkan laporan keuangan yang berkualitas. Dengan penerapan sistem akuntansi keuangan daerah ini diharapkan akan meningkatkan akuntabilitas dan keandalan laporan keuangan pemerintah yang dapat dilihat dari pencatatan, pengikhtisaran dan pelaporan. Sistem akuntansi keuangan daerah merupakan aktivitas jasa untuk menyediakan informasi yang diperlukan untuk pengambilan keputusan pada sektor publik, pengambilan keputusan terkait dengan keputusan baik pada sektor ekonomi, sosial dan politik, (Mahsun 2006: 185). Di Indonesia sistem akuntansi di tingkat pusat diatur oleh Peraturan Menteri Keuangan No.59/PMK/.06/2005

mengenai Sistem Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Pemerintah Pusat, sedangkan Sistem Akuntansi Pemerintah ditingkat daerah diatur oleh Peraturan Pemerintah Nomor 58 tahun 2005 mengenai Pengelolaan Keuangan dan juga didukung oleh Peraturan Pemerintah Nomor 59 tahun 2007 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah yaitu pasal 232 tentang Sistem Akuntansi Pemerintah Daerah.

Berdasarkan penjelasan diatas, penelitian ini penting dilakukan agar dapat mengetahui kualitas laporan keuangan yang dihasilkan oleh Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) Kota Palembang yaitu terdiri dari 16 Kecamatan di Kota Palembang. Sebelum diberlakukannya PP No. 71 tahun 2010, Laporan Keuangan di setiap instansi Pemerintahan menggunakan sistem berbasis Kas yaitu yang berpedoman pada PP No. 24 Tahun 2005. Setelah diberlakukannya PP No. 71 Tahun 2010, penyusunan laporan keuangan SKPD harus menerapkan basis akrual. Laporan keuangan yang berkualitas harus memenuhi empat kriteria yaitu relevan, andal, dapat dibandingkan, dan dapat dipahami. Dalam Ikhtisar Hasil Pemeriksaan Semester (IHPS) I Tahun 2015 (<http://www.bpk.go.id>) Laporan Keuangan Pemerintah Kota Palembang dalam jangka waktu 6 tahun terakhir dari tahun 2010-2015 mengalami perbaikan. Hal ini menunjukkan adanya perbaikan sistem pengelolaan dan tingkat tanggung jawab dalam pelaporan keuangan pemerintah daerah. Dari hasil audit Badan Pemeriksaan Keuangan atas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah Kota Palembang selama kurun waktu 6 tahun, dari tahun 2010-2015 data hasil Pemeriksaan BPK atas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah Kota Palembang sebagaimana disajikan dalam tabel 1.1

**Tabel 1.1**

Perkembangan Opini Laporan Keuangan Pemerintah Daerah Kota Palembang oleh Badan Pemeriksa Keuangan tahun 2011-2015.

No	Tahun	Opini
1	Tahun 2010	Wajar Dengan Pengecualian (WDP)
2	Tahun 2011	Wajar Tanpa Pengecualian (WTP)
3	Tahun 2012	Wajar Tanpa Pengecualian (WTP)
4	Tahun 2013	Wajar Tanpa Pengecualian (WTP)
5	Tahun 2014	Wajar Tanpa Pengecualian (WTP)
6	Tahun 2015	Wajar Tanpa Pengecualian (WTP)

*Sumber: Ikhtisar Hasil Pemeriksaan BPK RI, 2017*

Berdasarkan fenomena-fenomena yang terjadi, penelitian ini bertujuan untuk mengetahui kontribusi sistem akuntansi keuangan daerah atas hasil laporan keuangan Kota Palembang yang memperoleh opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) yang diraih kota Palembang. Penelitian ini merujuk kepada penelitian sebelumnya yaitu penelitian yang dilakukan oleh Permadi di Dinas Bina Marga Provinsi Jawa Barat tahun 2011 yang menyatakan adanya hubungan dan Sistem Akuntansi Keuangan Daerah mempengaruhi terhadap kualitas Laporan Keuangan. Hal ini berbeda dengan penelitian yang dilakukan Ihsanti 2014 yang membuktikan bahwa sistem akuntansi keuangan daerah tidak berpengaruh signifikan terhadap kualitas laporan keuangan pemerintah daerah pada tiga Dinas Kabupaten Buleleng. Perbedaan penelitian ini dengan penelitian yang disebutkan diatas adalah terletak pada objek yang diteliti, waktu dan tempat yang berbeda. Berdasarkan uraian-uraian yang telah dijelaskan dengan didukung dengan fakta-fakta yang ada. Penulis ingin meneliti lebih jauh dan mendalam tentang “Pengaruh Penerapan Sistem Akuntansi Keuangan Daerah terhadap Kualitas Laporan Keuangan Daerah Pada SKPD Kecamatan Kota Palembang”.

## **1.2 Rumusan Masalah**

Berdasarkan latar belakang yang telah diuraikan, maka permasalahan dalam penelitian ini, yaitu:

1. Bagaimana Pengaruh Penerapan Sistem Akuntansi Keuangan Daerah Terhadap Kualitas Laporan Keuangan Daerah Pada SKPD Kecamatan Kota Palembang
2. Seberapa besar pengaruh Sistem Akuntansi Keuangan Daerah berpengaruh terhadap Kualitas Laporan Keuangan Daerah Pada SKPD Kecamatan Kota Palembang ?

## **1.3 Ruang Lingkup Penelitian**

Agar dalam penulisan Proposal Skripsi ini tidak menyimpang dari permasalahan yang ada, penulis membatasi ruang lingkup pembahasannya yaitu pada Sistem Akuntansi Keuangan Daerah, dan Laporan Keuangan. Populasi dalam penelitian ini adalah Satuan Kerja Perangkat Daerah Kota (SKPD) Palembang, yaitu Seluruh Kecamatan yang ada di Kota Palembang. Dan sampel dari penelitian ini adalah Kepala dan Staf Bidang Keuangan yang ada di 16 kecamatan Kota Palembang.

## **1.4 Tujuan dan Manfaat Penelitian**

### **1.4.1 Tujuan Penelitian**

Sesuai dengan perumusan masalah yang ada, maka tujuan dari penulisan laporan akhir ini yaitu :

1. Untuk melihat bagaimana Pengaruh Penerapan Sistem Akuntansi Keuangan Daerah Terhadap Kualitas Laporan Keuangan Daerah Pada SKPD Kecamatan Kota Palembang ?
2. Untuk menguji Apakah Sistem Akuntansi Keuangan Daerah Berpengaruh Terhadap Kualitas Laporan Keuangan Daerah Pada SKPD Kecamatan Kota Palembang ?

### **1.4.2 Manfaat Penelitian**

Penulisan laporan akhir ini, diharapkan dapat memberikan manfaat bagi pihak yang berkepentingan, yaitu :

1. Bagi Penulis

Dapat menambah dan mengembangkan pengetahuan, khususnya untuk mata kuliah akuntansi pemerintah serta mampu menerapkan teori yang didapat selama kuliah dengan kenyataan yang ada di instansi.

2. Bagi Instansi

Sebagai masukan dan gambaran dari pengaruh penerapan SAKD terhadap kualitas laporan keuangan SKPD di kota Palembang.

3. Bagi Lembaga

Sebagai bahan pengayaan perpustakaan khususnya bagi mahasiswa jurusan akuntansi yang berminat dengan penulisan dibidang akuntansi pemerintah.

### **1.5 Sistematika Penulisan**

Guna membuat laporan ini lebih terarah, maka secara garis besar penelitian ini terdiri dari lima bab dimana tiap-tiap bab memiliki keterkaitan antara satu dengan yang lainnya. Berikut ini akan diuraikan secara singkat mengenai sistematika penulisan penelitian ini yaitu:

#### **BAB I PENDAHULUAN**

Bab ini penulis menguraikan latar belakang, perumusan masalah, ruang lingkup penelitian, tujuan dan manfaat penelitian, metodologi penelitian dan sistematika penulisan.

#### **BAB II TINJAUAN PUSTAKA**

Bab ini berisi teori-teori pendukung yang digunakan dalam penelitian untuk melakukan analisis dan pembahasan. Adapun teori-teori yang digunakan yaitu pengertian Standar Akuntansi Pemerintah, Sistem Akuntansi Keuangan Daerah, Laporan keuangan, Jenis-jenis Laporan keuangan Pemerintah daerah, dan Kualitas Laporan keuangan.

**BAB III METODOLOGI PENELITIAN**

Bab ini menguraikan tentang jenis dan sumber data, model penelitian, metode analisis data yang digunakan dalam penelitian.

**BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN**

Bab ini membahas tentang hasil yang didapat setelah mengadakan penelitian yang mencakup gambaran umum penelitian, dan hasil penelitian dengan alat regresi sederhana.

**BAB V KESIMPULAN DAN SARAN**

Bab ini berisi simpulan berdasarkan hasil analisis data yang telah dilakukan penulis dan dari simpulan dapat memberikan saran sebagai masukan untuk penelitian selanjutnya.